

BAB 5

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi mitigasi bencana erupsi Gunung Marapi yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam dan BPBD Kota Bukittinggi, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Strategi komunikasi mitigasi bencana yang dilakukan oleh BPBD Kabupaten Agam dan BPBD Kota Bukittinggi dalam menghadapi erupsi Gunung Marapi menunjukkan penerapan pola komunikasi risiko yang kolaboratif, adaptif, dan berlapis. Kedua lembaga memadukan komunikasi formal dan informal dengan melibatkan masyarakat, media sosial, serta koordinasi lintas instansi. Pada tahap prabencana, BPBD menekankan edukasi kesiapsiagaan melalui sosialisasi langsung di sekolah dan permukiman warga mengenai tas siaga, jalur evakuasi, serta titik kumpul aman, meskipun publikasi digital belum optimal. Saat bencana berlangsung, strategi komunikasi diarahkan pada penyampaian informasi darurat dan koordinasi antarinstansi seperti Basarnas, TNI, Polri, dan relawan. Penggunaan Instagram menjadi sarana utama untuk memperbarui kondisi terkini, korban, dan imbauan keselamatan secara real-time. Sementara pada tahap pascabencana, komunikasi berfokus pada pemulihan dan pembaruan informasi melalui kanal digital dan pertemuan lapangan bersama tokoh masyarakat. Pola ini memperlihatkan bahwa keberhasilan mitigasi tidak hanya bergantung pada kapasitas teknis, tetapi juga efektivitas komunikasi yang cepat, kredibel, dan berorientasi pada kepercayaan publik. Pembagian

peran yang jelas antara kedua BPBD memperkuat sinergi komunikasi, di mana BPBD Kabupaten Agam mengoordinasikan informasi teknis mengenai aktivitas vulkanik, sementara BPBD Kota Bukittinggi mengelola komunikasi publik terkait kondisi lapangan dan proses evakuasi. Strategi kolaboratif ini menegaskan bahwa komunikasi risiko yang efektif memerlukan koordinasi lintas lembaga, adaptasi terhadap konteks lokal, serta pemanfaatan media sosial sebagai pendukung utama penyebaran informasi kebencanaan.

2. Hambatan utama dalam komunikasi mitigasi bencana berkaitan dengan resistensi sosial-budaya masyarakat dan keterbatasan kapasitas kelembagaan, yang kemudian memengaruhi pola respons warga terhadap pesan mitigasi. Dari sisi internal, keterbatasan sumber daya manusia, sarana komunikasi darurat, dan gangguan jaringan internet menjadi kendala dalam mempercepat penyebaran informasi. Dari sisi eksternal, masyarakat menunjukkan variasi respons terhadap instruksi mitigasi. Sebagian besar warga mengikuti arahan evakuasi dan menunjukkan solidaritas sosial yang kuat dalam membantu sesama, namun sebagian lainnya menolak atau menunda evakuasi karena faktor ekonomi, kekhawatiran terhadap harta benda, keyakinan tradisional, serta rendahnya kepercayaan pada informasi resmi. Fenomena ini menggambarkan adanya *culture of disaster* (Bankoff, 2003), di mana nilai-nilai lokal dan persepsi risiko memengaruhi cara masyarakat merespon ancaman. Selain itu, penyebaran hoaks dan rendahnya literasi digital memperburuk kebingungan publik selama bencana. Untuk menghadapi hal tersebut, BPBD mengembangkan

pendekatan kultural dan partisipatif dengan melibatkan tokoh masyarakat, seperti niniak mamak, alim ulama, dan pemimpin nagari, sebagai jembatan antara lembaga dan warga. Pendekatan ini membantu memperkuat kepercayaan, memperbaiki penerimaan pesan mitigasi, serta meningkatkan efektivitas komunikasi risiko di lapangan. Dengan demikian, keberhasilan komunikasi mitigasi tidak hanya ditentukan oleh kecepatan informasi, tetapi juga oleh kemampuan lembaga menyesuaikan pesan dengan konteks sosial-budaya masyarakat serta membangun kolaborasi lintas sektor yang berkelanjutan.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai komunikasi mitigasi bencana erupsi Gunung Marapi oleh BPBD Kabupaten Agam dan BPBD Kota Bukittinggi, maka saran yang dapat diberikan berfokus pada dua aspek utama, yaitu strategi komunikasi mitigasi bencana dan penanganan hambatan serta penguatan respons masyarakat.

1. Mengenai strategi komunikasi mitigasi bencana, BPBD perlu memperkuat efektivitas komunikasi dengan mengoptimalkan berbagai kanal, terutama media sosial, sebagai sarana penyampaian informasi yang berkesinambungan. Publikasi mengenai tas siaga, jalur evakuasi, hingga informasi status gunung perlu dilakukan secara konsisten, bahkan pada masa prabencana, agar masyarakat lebih siap menghadapi potensi ancaman. Penggunaan media sosial juga harus diimbangi dengan peningkatan kapasitas sumber daya manusia serta infrastruktur komunikasi agar arus informasi tetap stabil di wilayah dengan akses terbatas. Selain itu,

koordinasi lintas lembaga antara BPBD Kabupaten Agam, BPBD Kota Bukittinggi, dan instansi pendukung seperti Basarnas, TNI, Polri, dan Dinas Sosial perlu terus diperkuat melalui evaluasi rutin dan pembagian peran yang jelas. Kolaborasi semacam ini menjadi fondasi penting untuk menciptakan komunikasi yang cepat, terarah, dan terkoordinasi selama penanggulangan bencana. Dalam jangka panjang, strategi komunikasi yang terintegrasi, adaptif, dan partisipatif diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik sekaligus meningkatkan efektivitas mitigasi di wilayah rawan erupsi.

2. Untuk menghadapi resistensi sosial dan budaya yang masih menjadi tantangan utama, BPBD perlu mengembangkan pendekatan komunikasi berbasis budaya lokal dengan melibatkan tokoh adat, ulama, dan pemimpin masyarakat dalam setiap kegiatan sosialisasi. Pendekatan ini akan memperkuat legitimasi pesan mitigasi serta menumbuhkan rasa kepemilikan masyarakat terhadap upaya pengurangan risiko bencana. Selain itu, peningkatan literasi kebencanaan dan literasi digital sangat penting untuk mengurangi penyebaran hoaks dan memperbaiki pemahaman masyarakat terhadap pesan resmi. BPBD juga disarankan mengembangkan program edukasi berbasis komunitas yang menempatkan warga sebagai mitra aktif, bukan sekadar penerima informasi. Dengan demikian, partisipasi warga dalam proses evakuasi, penyelamatan, dan pemulihan akan semakin tinggi. Respons masyarakat yang sudah menunjukkan solidaritas sosial perlu terus diperkuat melalui kegiatan kebencanaan

berbasis gotong royong, agar kesadaran kolektif dalam menghadapi risiko dapat terpelihara dan diturunkan lintas generasi.

Secara keseluruhan, saran ini menegaskan bahwa keberhasilan komunikasi mitigasi bencana tidak hanya bergantung pada kemampuan teknis penyampaian informasi, tetapi juga pada kepekaan lembaga dalam memahami konteks sosial dan budaya masyarakat. Kolaborasi lintas lembaga yang sinergis dan partisipasi masyarakat yang aktif akan menjadi dasar terbentuknya sistem mitigasi yang tangguh, berkelanjutan, dan berpusat pada manusia.

